



QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan.....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan.....

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;

28. Peraturan.....

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.248.393.437.876,- bertambah sejumlah Rp. 97.925.001.368,- sehingga menjadi Rp. 1.346.318.439.243,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.247.693.437.876,- |
| b. Bertambah | Rp. <u>38.526.620.613,-</u> |
| Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan | Rp. 1.286.220.058.489,- |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 1.248.393.437.876,- |
| b. Bertambah | Rp. <u>97.925.001.368,-</u> |

Jumlah.....

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.346.318.439.244,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (60.098.380.755),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 15.000.000.000,-
-----------	----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 53.398.380.755,-</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan	Rp. 68.398.380.755,-
-------------------	----------------------

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 14.300.000.000,-
-----------	----------------------

2) Berkurang	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
--------------	----------------------------

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan	Rp. 8.300.000.000,-
-------------------	---------------------

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan	Rp. 60.098.380.755,-
-------------------	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan	Rp. 0,-
-------------------	---------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 240.438.164.073,-
-----------	-----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 40.438.867.660,-</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan	Rp. 280.877.031.733,-
-------------------	-----------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 763.384.067.000,-
-----------	-----------------------

2) Berkurang	<u>Rp. 10.580.616.000,-</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 752.803.451.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp. 243.871.206.803,-
- 2) Bertambah Rp. 8.668.368.953,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp. 252.539.575.756,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 61.095.000.000,-
- 2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp. 61.095.000.000,-

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 28.084.430.000,-
- 2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp. 28.084.430.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

- 1) Semula Rp. 1.100.000.000,-
- 2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 1.100.000.000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 131.554.234.073,-
- 2) Bertambah Rp. 40.438.867.660,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah setelah Perubahan Rp. 171.993.101.733,-

e. Zakat

e. Zakat

1) Semula	Rp.	18.604.500.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Zakat setelah		
Perubahan	Rp.	18.604.500.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

1) Semula	Rp.	35.615.752.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil		
setelah Perubahan	Rp.	35.615.752.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	602.292.108.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>10.580.336.000,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah		
Perubahan	Rp.	591.711.772.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	125.476.207.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>280.000,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah		
Perubahan	Rp.	125.475.927.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

b. Dana.....

- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------|------------|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Darurat | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 0,- |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
- | | | |
|--|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 28.614.102.121,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>578.534.953,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 29.192.637.074,- |
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 70.923.443.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 70.923.443.000,- |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 128.838.661.682,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 128.838.661.682,- |
- f. Pendapatan Yang Sah Lainnya
- | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.495.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>8.089.834.000,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 23.584.834.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 621.774.297.721,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>22.740.074.034,-</u> |

Jumlah

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 644.514.371.755,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 626.619.140.155,-

2) Bertambah Rp. 75.184.927.334,-

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 701.804.067.489,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 465.274.262.621,-

2) Bertambah Rp. 24.236.794.029,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 489.511.056.650,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 3.400.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 3.400.000.000,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 11.042.400.000,-

2) Bertambah Rp. 147.400.000,-

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 11.189.800.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 2.510.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 2.510.000.000,-

f. Belanja.....

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	136.547.635.100,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>855.880.005,-</u>

Jumlah Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp. 137.403.515.105,-

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,-</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	90.714.737.826,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.642.461.900,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp. 98.357.199.726,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	297.406.127.183,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>64.246.938.544,-</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp. 361.653.065.727,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	238.498.275.146,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.295.526.890,-</u>

Jumlah Belanja Modal
setelah Perubahan Rp. 241.793.802.036,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.398.380.755,-</u>
Jumlah Penerimaan		
setelah Perubahan	Rp.	68.398.380.755,-

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	14.300.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan	Rp.	8.300.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.398.380.755,-</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
setelah Perubahan	Rp.	68.398.380.755,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	11.500.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)		
setelah Perubahan	Rp.	5.500.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Hutang		
1) Semula	Rp.	2.800.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang		
setelah Perubahan	Rp.	2.800.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6.....

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Oktober 2017 M
13 Muharram 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH

TTD

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Oktober 2017 M
13 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

TTD

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : 5/92/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

